

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



## DIREKTORAT POTENSI DAN SUMBER DAYA SOSIAL



# DAFTAR ISI LAPORAN

- ✧ Daftar Isi
- ✧ Kata Pengantar
- ✧ Ringkasan Eksekutif

## **BAB I**

**Pendahuluan** →

- A. Gambaran Umum**
- B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**
- C. Struktur Organisasi**
- D. Komposisi SDM**
- E. Isu Strategis**
- F. Sistematisasi Penulisan**

## **BAB II**

**Perencanaan  
Kinerja** →

- A. Rencana Strategis**
- B. Rencana Kerja**
- C. Perjanjian Kinerja**
- D. Anggaran**

## **BAB III**

**Akuntabilitas  
Kinerja** →

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Capaian Kinerja Lainnya**
- C. Realisasi Anggaran**
- D. Analisis Efisiensi**

## **BAB IV**

**Penutup** →

- A. Kesimpulan**
- B. Tindak Lanjut**
- C. Lampiran**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahNya maka Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Tahun anggaran 2022 dapat disusun tepat pada waktunya. Laporan Kinerja (LKj) ini di susun sesuai dengan program yang telah di rencanakan sehingga kegiatan yang di hasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengukuran kinerja Direktorat PSDS selama periode Tahun 2022. Adanya pengembangan program pada Direktorat PSDS dapat meningkatkan program kerja yang menitikberatkan pada peningkatan program kesejahteraan sosial. Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat PSDS atas penggunaan anggaran tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan indikator kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dan tidak dibatasi pada kinerja tahun bersangkutan, tetapi sesuai dengan output yang dihasilkan.

Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial ini bermanfaat untuk semua pihak serta dapat meningkatkan pelaksanaan program Direktorat PSDS guna mendukung terealisasinya pembangunan kesejahteraan sosial baik di tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial

Raden Rasman



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka tahun 2022, merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN 2020-2024). Semakin menyempitnya rentang waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan program kesejahteraan sosial, maka penyelesaian respon kasus secara cepat dan pencapaian target program harus menjadi tujuan utama dalam memanfaatkan sumber dana bantuan sosial secara transparan dan akuntabel untuk membangun karakter masyarakat yang kuat dan mandiri pasca pandemi covid.

Salah satu bentuk program yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial adalah pemanfaatan dana hibah yang dapat dipergunakan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pertanggungjawaban yang tepat. Untuk menyajikan informasi yang tepat maka disusunlah LKJ Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial. LKJ merupakan sebuah ikhtisar yang menunjukkan pencapaian kinerja instansi yang telah disesuaikan dengan Rencana Aksi Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun berjalan. Di dalam LKJ telah tertuang laporan yang mengukur pencapaian kinerja dalam menjalankan visi, misi, tujuan, sasaran, tugas dan fungsi Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial.

Tujuan pelaporan kinerja selain untuk menyajikan bentuk informasi yang akuntabel juga mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Satuan Kerja dalam mengemban tanggungjawab terkait perencanaan program. LKJ dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial, sebagai bahan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang telah disusun dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi salah satu literasi penyempurna berbagai kebijakan di lingkup Satuan Kerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial. Di dalam Laporan Kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial ini tertuang sasaran kegiatan yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator kegiatan:

- Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesos
- Persentase (%) penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)
- Persentase (%) penyelesaian perizinan pengumpulan uang atau barang (PUB)
- Dukungan Layanan Manajemen Perizinan

2. Terpeliharanya TMPN Utama Kalibata dan MPN Seluruh Indonesia, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
- Persentase (%) kepuasan layanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama dan Makam Pahlawan Nasional

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian dan UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Kementerian Sosial diberikan amanat untuk mengelola perizinan Undian Gratis Berhadiah ( UGB ) dan perizinan Pengumpulan Uang atau Barang ( PUB ). Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial diberikan amanat untuk memelihara dan mengelola Taman Makam Pahlawan Nasional Utama ( TMPNU ) dan Makam Pahlawan Nasional ( MPN ) baik yang di dalam maupun yang di luar negeri.

Sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial (PSDS) merupakan satuan kerja setingkat eselon 2 dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Direktorat PSDS diberikan amanat untuk mengelola Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang, serta memelihara dan mengelola TMPNU Kalibata di Jakarta, MPN di seluruh Indonesia dan TMPN Seroja di Timor Leste.

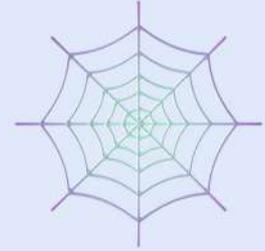
Isu Strategis Perizinan UGB antara lain untuk meningkatkan promosi barang/jasa oleh penyelenggara melalui pelaksanaan UGB yang memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Perizinan UGB sebesar Rp. 100.000 untuk Biaya Permohonan Izin Penyelenggaraan UGB dan PNPB untuk Biaya Izin Promosi/Iklan sebesar Rp. 200.000. Selain itu, Penyelenggara UGB juga berkewajiban untuk membayarkan Dana UKS sebesar 10% dari total nilai hadiah. Potensi penerimaan negara yang bersumber dari penyelenggaraan UGB yang lain adalah pajak hadiah pemenang sebesar 25%.

Penggunaan dana UKS sebesar 10% diperuntukan penggunaannya dalam membantu peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berisiko sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemeliharaan dan pengelolaan TMPNU dan MPN merupakan wujud penghargaan dari negara kepada pahlawan nasional dan untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keprintisandan kesetiakawanan sosial.



## B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI



### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial kedudukan Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

#### Tugas

Pada Pasal 104 Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e mempunyai tugas "*melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dan pemantauan di bidang potensi dan sumber daya sosial*"

Pada Pasal 105 Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial memiliki **Fungsi** antara lain:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi dan sumber daya sosial

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi dan sumber daya sosial;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi dan sumber daya sosial;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang potensi dan sumber daya sosial;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat.

# STRUKTUR ORGANISASI

## Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, kedudukan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial adalah sebagai unit Eselon II teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Berdasarkan pasal 106 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022, Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, masing-masing Tim Kerja berpedoman pada SK Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Nomor 1051/5.5/OT.01/12/2022 tentang Tim Kerja pada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial . Berikut bagan Struktur Organisasi Direktorat PSDS.



## D. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat PSDS dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sebanyak 131 ASN yang terdiri dari 46 orang PNS dan 85 orang (PPNPN). Adapun Rincian Jabatan Fungsional yang ada pada Direktorat PSDS adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya sebanyak 2 orang pegawai;
2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 1 orang pegawai;
3. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda sebanyak 2 orang pegawai;
4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 2 orang pegawai;
5. Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda sebanyak 1 orang pegawai;
6. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama sebanyak 2 orang pegawai
7. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 34 orang

### KOMPOSISI JABATAN

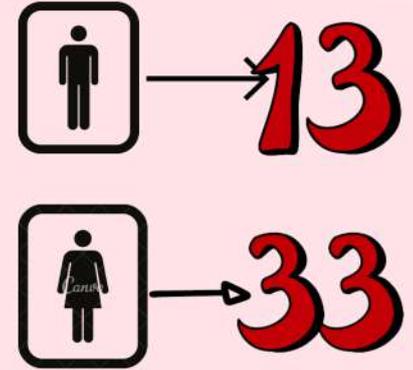
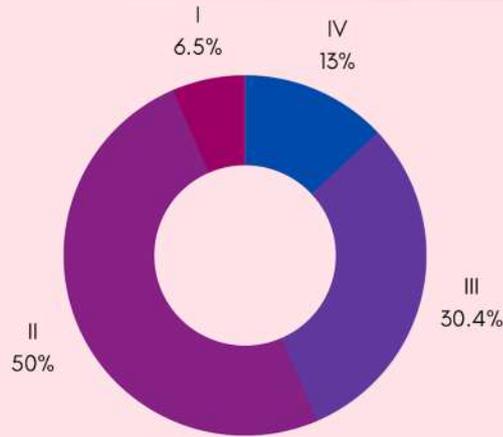


## PNS

### PENDIDIKAN

### GOLONGAN

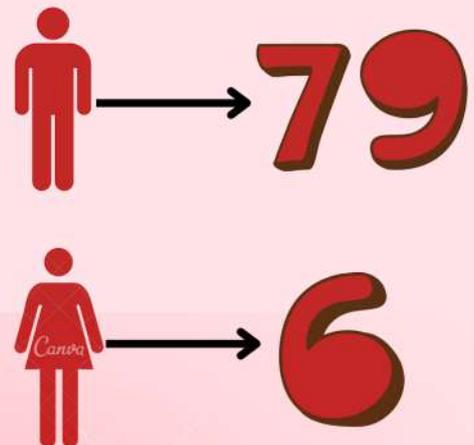
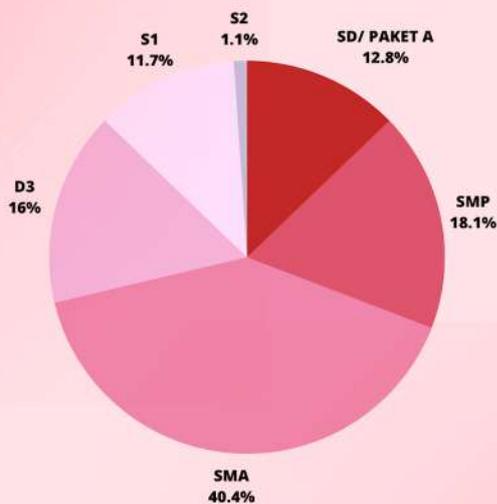
### GENDER



## PPNPN

### PENDIDIKAN

### GENDER





## E. ISU STRATEGIS



Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan pada Direktorat PSDS khususnya masa pasca pandemi covid 19, banyak hal yang harus dibenahi oleh Direktorat PSDS khususnya dalam bidang penyelenggaraan UGB dan PUB. Terbitnya Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang UGB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang PUB masih berdampak signifikan untuk peningkatan permohonan penyelenggaraan izin UGB dan PUB.

Adanya temuan hasil pemeriksaan BPK terkait banyaknya laporan yang belum disampaikan oleh penyelenggara UGB maupun PUB, mengakibatkan penundaan penerbitan izin SK penyelenggaraan UGB dan PUB yang sudah diajukan oleh Penyelenggara. Sistem pelaporan yang dapat diunggah melalui aplikasi sangat membantu penyelenggara dalam mengatasi permasalahan yang selama ini dirasakan sulit untuk diselesaikan.

Adanya faktur kuitansi pembelian barang yang harus dilengkapi oleh penyelenggara UGB juga berdampak terhadap permohonan izin penyelenggaraan UGB. Hal ini dikarenakan sebelum adanya kebijakan tersebut penyelenggara UGB masih diperbolehkan hanya melampirkan bukti pemesanan barang untuk jenis hadiah undian.

Semakin hari semakin berkembang jenis problematika yang menjadi perhatian pemerintah. Anggaran Pemerintah yang tidak bisa menjangkau seluruh permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah kabupaten/kota menjadikan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terutama yang bersumber dari dana hibah sebagai salah satu pendukung dalam menangani permasalahan sosial. Penggunaan dana hibah yang semakin luas peruntukkannya menjadi salah satu anggaran pendukung dalam semua permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Dana hibah tidak hanya dapat dipergunakan untuk jenis bantuan sosial saja akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan operasional lainnya. Selain itu, anggaran hibah juga dapat dipergunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana selama hal itu merupakan bagian dari proses penyaluran bantuan sosial dan pemanfaatan dana hibah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui pemanfaatan dana hibah yang semakin luas penggunaannya maka akan mengurangi tingkat permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

**LANJUTAN ISU STRATEGIS**

Terhimpunnya sumber dana bantuan sosial berupa Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Bentuk Uang dan/atau Barang, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta potensi sumber dana sosial hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang diperoleh dari dana masyarakat secara langsung turut mendukung pemerintah dalam program jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Meskipun didalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, namun Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial selalu berupaya secara optimal untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek guna peningkatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang mengalami resiko sosial maupun kelompok rentan.

Isu-isu strategis yang masih dihadapi Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, antara lain :

**TERBITNYA PERATURAN  
MENTERI SOSIAL NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG UNDIAN  
GRATIS BERHADIAH**

Direktorat PSDS harus melakukan sosialisasi secara berjenjang terkait Peraturan Menteri Sosial secara massif karena adanya perubahan yang bersifat substansi antara lain yang mengatur bahwa penyelenggara Undian Gratis Berhadiah harus berbadan hukum serta adanya aturan bahwa penyelenggara UGB memiliki kewajiban untuk mengasuransikan hadiah.

**TERBITNYA PERATURAN  
MENTERI SOSIAL NOMOR 8  
TAHUN 2021 TENTANG  
PENGUMPULAN UANG ATAU  
BARANG**

Pada peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang harus berbadan hukum, dan aturan tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang disalurkan keluar negeri.



## LANJUTAN ISU STRATEGIS

### KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA YANG TIDAK SESUAI

Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang sangat menentukan dalam mengembangkan budaya organisasi yang berkualitas. Sebagai obyek aktif, SDM harus mampu menghadapi segala perubahan teknologi dan budaya yang berkembang sangat pesat dalam era digitalisasi modern saat ini. Kondisi fisik dan psikis dalam tiap individu dapat mempengaruhi tingkat pengembangan kreatifitas pegawai dalam menghadapi segala macam persoalan yang timbul secara alamiah maupun persoalan rutin di dalam pekerjaan. SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya di Direktorat PSDS saat ini sangatlah terbatas. Salah satu yang masih dibutuhkan adalah SDM yang sudah terdidik dalam mengatasi tindak pelanggaran dan adanya indikasi penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan penyelenggara Undian Gratis Berhadiah serta Pengumpulan Uang atau Barang

### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 dan 8 Tahun 2021, Direktorat PSDS perlu melakukan pengembangan aplikasi terhadap sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyajian data agar sejalan dengan perubahan peraturan yang ada saat ini. Tahun 2022 Direktorat PSDS pengembangan sistem informasi belum dilakukan karena kemampuan SDM dalam mengelola sistem informasi masih perlu ditingkatkan lagi. Anggaran yang terbatas juga menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pengembangan sistem informasi yang ada pada Direktorat PSDS.

Berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang saat ini, maka Direktorat PSDS telah merumuskan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat PSDS Tahun 2020-2024. Rencana kinerja yang menjelaskan visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran akan diuraikan pada penjelasan bab selanjutnya. Implementasi dari program Direktorat PSDS sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai Indikator kinerja yang terukur.



### PEMELIHARAAN TMP DAN MPN

Anggaran yang tersedia di Direktorat PSDS sangat berpengaruh terhadap terwujudnya pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan TMPN Utama Kalibata dan pemeliharaan TMPN Luar Negeri serta Makam Pahlawan Nasional. Salah satu perwujudan rasa penghormatan dan penghargaan atas jasa dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa adalah dengan merawat dan memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata dan Makam Pahlawan Nasional di DKI Jakarta. Suasana nyaman yang dirasakan oleh pengunjung dan para peziarah akan mampu meningkatkan minat berkunjung untuk para generasi muda yang mengalami penurunan nilai-nilai dalam meneladani jiwa kesetiakawanan sosial para pahlawan. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial harus selalu di tanamkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi pelajar dan generasi muda masa kini. Pemeliharaan TMP juga dilakukan untuk TMP yang ada di luar negeri seperti TMP di Timor Leste.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Direktorat PSDS adalah sebagai berikut:



### **BAB I PENDAHULUAN**

Uraian singkat tentang Gambaran Umum Organisasi dari segi kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, komposisi SDM, dan beberapa isu strategis serta sistematika penulisan laporan



### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Penjelasan singkat tentang rencana kinerja Direktorat PSDS yang mencakup visi, misi, penetapan tujuan, sasaran dan inisiatif strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2023



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja organisasi yang memuat analisis capaian kinerja, serta penyajian realisasi anggaran sampai dengan periode bulan April 2022.



### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan isi laporan disertai dengan lampiran pendukung dari seluruh Laporan Kinerja Direktorat PSDS tahun 2022.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2),

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial (PSDS) adalah Suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) agar berhasil efektif dan efisien. Rencana Strategis Direktorat PSDBS disusun sesuai sasaran, program, dan tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PSDBS.



## A. RENCANA KINERJA

Penyusunan dokumen Renstra pada level Kementerian/Lembaga (K/L) dan unit dibawahnya tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan unit organisasi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mendukung visi Kementerian Sosial dan merujuk misi Unit Kerja Eselon 1 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial , maka Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:



**Meningkatnya Sumber Dana Bantuan Sosial Untuk Mendukung masyarakat yang berdaya dan mandiri”.**



1. Meningkatkan kemitraan dan sinergitas penggalangan dana bantuan sosial untuk penanganan PPKS yang beresiko sosial;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan cepat dalam perizinan;
3. Meningkatkan akuntabilitas, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan UGB dan PUB secara lebih baik dan terpadu serta berkesinambungan.



**Berkontribusi mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui pemanfaatan dana HLDN yang tepat sasaran, adil, berkelanjutan, dan akuntabel**



## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



Berdasarkan rumusan Visi, Misi dan Tujuan, arah kebijakan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial secara garis besar adalah “Terlaksananya penyelenggaraan UGB dan PUB untuk mendukung penanganan PPKS yang beresiko sosial”.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka Direktorat PSDS menentukan arah kebijakan pada:

- Meningkatkan Penerbitan SK Izin UGB dan PUB.
- Meminimalisir terjadinya korban dampak penipuan berkedok penyelenggaraan UGB dan PUB.
- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM petugas pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UGB dan PUB.
- Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan penyaluran hibah langsung dalam negeri bentuk uang dan barang.

### STRATEGI DIREKTORAT PSDS

- Penjangkauan diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku penyelenggaraan UGB dan PUB.
- Konsultasi dan advokasi diarahkan untuk peningkatan pemantapan program serta SDM.
- Net Working diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menggali dan mengembangkan sumbangan sosial masyarakat melalui UGB dan PUB.

# RENCANA KINERJA

Penentuan indikator dan target kegiatan ditetapkan untuk mencapai sasaran kegiatan. Rincian Rencana Kegiatan yang ditetapkan Direktorat PSDS adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	• Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	• 95%
	• Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai izin.	• 100%
	• Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB	• 80%
2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai K2KRS	• Persentase (%) Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	• 95%
	• Persentase (%) kepuasan layanan pengunjung Taman Makam Pahlawan Nasional Utama	• 85%
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	• 80
4. Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	• Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	• 85

### SASARAN KEGIATAN 1

### INDIKATOR KEGIATAN 1

### TARGET

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESSOS**

**PERSENTASE (%) PENERIMAAN HASIL PENYELENGGARAAN UGB YANG DIMANFAATKAN DALAM PENYELENGGARAAN KESSOS**

• **95%**

### DEFINISI OPERASIONAL

### FORMULASI

$$n/t * 100\%$$

- **Penerimaan hasil Penyelenggara UGB adalah kontribusi penyelenggara UGB dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memberikan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang**
- **Pemanfaatan penerimaan hasil penyelenggaraan UGB adalah hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang disalurkan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

**n : Jumlah penerimaan hasil penyelenggaraan UGB yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesos**

**t : Jumlah penerimaan hasil penyelenggaraan UGB pada tahun berjalan**

### SATUAN PENGUKURAN

**Realisasi**  
 $= 131.021.067.341 / 131.021.069.000 \times 100$   
 $= 100\%$

Satuan Pengukuran	: -
Jenis Aspek Target	: Kualitas/Mutu
Jenis Perhitungan Data	: Rata-Rata
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Polarisasi	: Maximize (semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan

### SUMBER DATA

- Rekapitulasi jumlah SK Izin penyelenggaraan UGB dan PUB,
- Rekapitulasi penerimaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang hasil penyelenggaraan UGB ,
- Rekapitulasi penyaluran hibah langsung dalam negeri,
- Rekapitulasi laporan penyelenggaraan UGB
- Hasil Monitoring dan Evaluasi

### SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESSOS

### INDIKATOR KEGIATAN 2

PERSENTASE (%) PENYELENGGARA UGB DAN PUB YANG BERIZIN DAN MELAKUKAN PENYELENGGARAAN UGB DAN PUB SESUAI IZIN.

### TARGET

• **100%**

### DEFINISI OPERASIONAL

- Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain

### FORMULASI

$$n/t * 100\%$$

n : Jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang berizin

t : Jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai izin

$$\text{Realisasi} = 1072/1072 \times 100 = 100\%$$

### SATUAN PENGUKURAN

Satuan Pengukuran	: -
Jenis Aspek Target	: Kualitas/Mutu
Jenis Perhitungan Data	: Rata-Rata
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Polarisasi	: Maximize (semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan

### SUMBER DATA

Rekapitulasi Data Penerbitan SK Izin penyelenggaraan UGB dan PUB

**SASARAN KEGIATAN 1**

**INDIKATOR KEGIATAN 3**

**TARGET**

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESSOS**

**PERSENTASE (%) PENYELENGGARA UGB DAN PUB YANG BERIZIN DAN MELAPORKAN PENYELENGGARAAN UGB DAN PUB**

**• 80%**

**DEFINISI OPERASIONAL**

**FORMULASI**

- Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

$$n/t * 100\%$$

n : penyelenggara UGB dan PUB yang berizin

t : Jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB

$$\text{Realisasi} = 873/1072 \times 100 = 81,34\%$$

**SATUAN PENGUKURAN**

Satuan Pengukuran	: -
Jenis Aspek Target	: Kualitas/Mutu
Jenis Perhitungan Data	: Rata-Rata
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Polarisasi	: Maximize (semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan

**SUMBER DATA**

- Rekapitulasi Data Penerbitan SK Izin penyelenggaraan UGB dan PUB
- Rekapitulasi Data penyelenggara UGB dan PUB yang melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB



## SASARAN KEGIATAN 2

Terpeliharanya  
TMPN Utama  
Kalibata dan MPN  
Seluruh Indonesia

## INDIKATOR KEGIATAN 1

Persentase Jumlah Taman  
Makam Pahlawan yang  
terpelihara

## TARGET

• **95%**

### DEFINISI OPERASIONAL

- Taman makam Pahlawan adalah suatu tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukan bagi pemakaman para Pahlawan serta pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan

### FORMULASI

n: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara

t: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara tahun berjalan

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= 72/74 \times 100 \\ &= 97,30\% \end{aligned}$$

## SATUAN PENGUKURAN

<b>Satuan Pengukuran</b>	: Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional
<b>Jenis Aspek Target</b>	: Kualitas/Mutu
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	: Angka
<b>Metode Cascading</b>	: Komponen Pembentuk
<b>Polarisasi</b>	: Maximize ( Semakin Tinggi Semakin Baik )
<b>Periode Pelaporan</b>	: Tahunan

## SUMBER DATA

- Data Rekapitulasi jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara

SASARAN KEGIATAN 2	INDIKATOR KEGIATAN 2	TARGET
Terpeliharanya TMPN Utama Kalibata dan MPN Seluruh Indonesia	Persentase (%) kepuasan layanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama	• 85 %

### Definisi Operasional

Kepuasan Layanan adalah Kualitas Pelayanan adalah landasan utama untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Kualitas Pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sementara jika melebihi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat dikatakan pelayanan sangat memuaskan

### FORMULASI

$$n/t * 100\%$$

n : Jumlah pengunjung yang puas dengan pelayanan di TMPNU

t: Jumlah Pengunjung yang berziarah ke TMPNU yang mengisi survey

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= 3.157/3.573 \times 100 \\ &= 88,36\% \end{aligned}$$

Satuan Pengukuran	: -
Jenis Aspek Target	: Kualitas/Mutu
Jenis Perhitungan Data	: Rata-Rata
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Polarisasi	: Maximize (semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan

### SUMBER DATA

Data Rekapitulasi Nilai Kepuasan Peziarah Terhadap Pelayanan dan Fasilitas TMPN Kalibata

### **SASARAN KEGIATAN 3**

**Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja**

#### **INDIKATOR KEGIATAN 1**

**Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial**

#### **TARGET**

- 80

#### **Definisi Operasional**

**Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.**

#### **SUMBER DATA**

**Merujuk pada Nilai SAKIP**



## SASARAN KEGIATAN 4

**Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial**

### INDIKATOR KEGIATAN 1

**Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial.**

#### TARGET

- 85

### Definisi Operasional

**Kepuasan stakeholder adalah tingkat kepuasan kelompok atau individu yang diukur dengan cara membandingkan hasil yang telah diperoleh dengan tujuan suatu perencanaan, yang juga dipengaruhi oleh sudut pandang tiap stakeholder.**

### SUMBER DATA

**Hasil Survey yang dilakukan lembaga independen**



# ANGGARAN DIREKTORAT PSDS TAHUN 2022

## REVISI PAGU ANGGARAN

Direktorat PSDS merupakan salah satu Direktorat yang mengelola dana Hibah Langsung Dalam Negeri ( HLDN ). Sebagai pengelola anggaran HLDN maka Direktorat PSDS harus rutin melakukan pengesahan hibah anggaran sehingga mempengaruhi terhadap perubahan nilai pagu selama tahun berjalan. Selama Tahun Anggaran 2022 Direktorat PSDS telah melakukan revisi anggaran sebanyak 16 kali. Perubahan pagu pada Direktorat PSDS merupakan hal yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan adanya pengesahan belanja hibah sebagai pagu anggaran.

	<b>BELANJA BARANG</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>BELANJA BANSOS HIBAH</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>PAGU</b>	<b>20.024.044.000</b>	<b>7.022.090.000</b>	<b>131.021.069.000</b>	<b>158.067.203.000</b>
<b>REALISASI</b>	<b>19.586.085.759</b>	<b>6.995.298.500</b>	<b>131.021.067.341</b>	<b>157.602.451.600</b>
<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>437.958.241</b>	<b>26.791.500</b>	<b>1.659</b>	<b>464.751.600</b>
<b>% REALISASI</b>	<b>97,81</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>	<b>99,71</b>

**PERJANJIAN  
KINERJA  
DIREKTORAT  
POTENSI DAN  
SUMBER  
DAYA SOSIAL  
TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesos	95%
	2. Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai izin	100%
	3. Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB	80%
2. Meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai K2KRIS	1. Persentase (%) Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	95%
	2. Persentase (%) kepuasan layanan pengunjung Taman Makam Pahlawan Nasional Utama	85%
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	80
4. Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	1. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	85

## **Berikut Rincian Tim Kerja Direktorat PSDS:**

### **A. TIM PERIZINAN DAN PEMANTAUAN UGB, PUB, DAN LKS**

Memiliki tanggungjawab dalam mendukung **Sasaran Kinerja** yaitu:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

### **B. TIM KERJA PEMANFAATAN HIBAH UANG DAN BARANG**

Dengan Indikator Kegiatan:

- **PERSENTASE (%) PENERIMAAN HASIL PENYELENGGARAAN UGB YANG DIMANFAATKAN DALAM PENYELENGGARAAN KESSOS**
- **PERSENTASE (%) PENYELENGGARA UGB DAN PUB YANG BERIZIN DAN MELAKUKAN PENYELENGGARAAN UGB DAN PUB SESUAI IZIN.**
- **PERSENTASE (%) PENYELENGGARA UGB DAN PUB YANG BERIZIN DAN MELAPORKAN PENYELENGGARAAN UGB DAN PUB**

- **Penerimaan hasil Penyelenggara UGB adalah kontribusi penyelenggara UGB dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memberikan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang**
- **Pemanfaatan penerimaan hasil penyelenggaraan UGB adalah hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang disalurkan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

### **C. TIM KERJA URUSAN TMPNU DAN MPN**

mendukung **Sasaran Kegiatan** :

**MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI K2KRS**

Dengan Indikator Kegiatan yaitu:

- **JUMLAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA**
- **Persentase (%) kepuasan layanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama**



**TUGAS  
TIM  
KERJA**

1. "Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UGB, PUB, LKS, Pemanfaatan Hibah Uang dan Barang, TMPNU dan MPN pada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial "
2. "Menjamin terlaksananya kegiatan UGB,PUB,LKS, Pemanfaatan Hibah Uang dan Barang, TMPNU dan MPN dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan "
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UGB, PUB, LKS, Pemanfaatan Hibah Uang dan Barang, TMPNU, dan MPN kepada Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial.

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA DAN

# ANGGARAN

## A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial adalah “Baik”, dengan parameter telah memenuhi seluruh target yang dibebankan, dengan rincian target kinerja sebagai berikut:

### LAPORAN UMUM AKAN MENYERTAKAN:

- Capaian Kinerja
  - Sasaran Kegiatan
  - Indikator Kegiatan
  - Perbandingan Realisasi dan Target
  - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya
  - Analisis Capaian Indikator Kegiatan
- Realisasi Anggaran
  - Berdasarkan Sumber Dana
  - Realisasi Keuangan dan Fisik
  - Realisasi dan Target PNBP
  - Perbandingan 3 Tahun
  - Realisasi Anggaran Per Kegiatan
  - Realisasi Pendapatan dan Penyaluran Hibah
  - Realisasi Pendapatan PNBP

**Sasaran Kegiatan 1****Indikator Kegiatan****Target****Capaian**

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai izin.
- Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB

• 95%

• 105,26%

• 100%

• 100%

• 80%

• 101,68%

Capaian realisasi pada Sasaran Kegiatan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk peningkatan target dan capaian pada tahun berikutnya.

**Sasaran Kegiatan 2****Indikator Kegiatan****Target****Capaian**

2. Terpeliharanya TMPN Utama Kalibata dan MPN Seluruh Indonesia

1. Persentase (%) Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
2. Persentase (%) kepuasan layanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama

• 95 %

• 102,42%

• 85 %

• 103,95%

Capaian realisasi pada Sasaran Kegiatan 2 sudah tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk peningkatan target tahun berikutnya, Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial perlu melakukan langkah-langkah yang tepat agar penentuan target yang lebih tinggi dapat tercapai.

Untuk menunjang keberhasilan terhadap target kinerja yang belum mencapai 100% maka perlu dilakukan penerapan SOP terhadap pelayanan perizinan UGB maupun PUB. Pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan PUB juga perlu dimaksimalkan untuk memenuhi target penyelenggaraan PUB yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

## B. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

### Sasaran Kegiatan 1

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber dana masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

### Indikator Kegiatan

1. Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai izin.
2. Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB

### TAHUN 2021

#### REKAPITULASI SK TAHUN 2021 PERBULAN

NO	BULAN	TOTAL	UGB	PUB	UGBTL	UGBL	PUBNB	PUBB
1	JANUARI	45	43	2	36	7	2	0
2	FEBRUARI	90	81	9	74	7	5	4
3	MARET	71	59	12	53	6	6	6
4	APRIL	201	164	37	143	21	26	11
5	MEI	131	113	18	102	11	11	7
6	JUNI	39	31	8	29	2	5	3
7	JULI	97	90	7	85	5	4	3
8	AGUSTUS	120	109	11	95	14	7	4
9	SEPTEMBER	106	87	19	76	11	11	8
10	OKTOBER	55	45	10	39	6	7	3
11	NOVEMBER	101	91	10	85	6	8	2
12	DESEMBER	248	222	26	208	14	19	7
TOTAL		1304	1135	169	1025	110	111	58
					1304			

Pada Tahun 2021 capaian realisasi pada indikator kegiatan untuk persentase penyelesaian perizinan UGB dapat tercapai sebanyak 1.135 SK izin UGB atau sekitar 113,50%. Angka tersebut lebih besar dari target awal sebanyak 1000 SK Izin UGB. Untuk SK izin PUB hanya terbit sebanyak 169 SK, sehingga target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 200 SK tidak bisa tercapai. Tahun 2021 SK Izin PUB hanya terbit sekitar 84,50%. SK Perizinan PUB tidak mencapai target disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang tidak memahami aturan atau regulasi yang mengatur tentang Pengumpulan Uang atau Barang sehingga marak beredar pengumpulan uang di masyarakat yang tidak berizin.

## TAHUN 2022

## REKAPITULASI SK TAHUN 2022 PERBULAN

NO	BULAN	TOTAL	UGB		PUB	
			UGBTL	UGBL	PUBNB	PUBB
1	JANUARI	80	63	5	8	4
2	FEBRUARI	73	60	4	7	2
3	MARET	193	153	14	21	5
4	APRIL	99	75	8	13	3
5	MEI	82	59	3	15	5
6	JUNI	65	47	6	10	2
7	JULI	75	51	8	13	3
8	AGUSTUS	79	61	6	10	2
9	SEPTEMBER	75	71	4	0	0
10	OKTOBER	75	50	3	17	5
11	NOVEMBER	115	102	6	6	1
12	DESEMBER	61	48	4	5	4
<b>TOTAL</b>		<b>1072</b>	<b>840</b>	<b>71</b>	<b>125</b>	<b>36</b>
			<b>911</b>		<b>161</b>	
			<b>1072</b>			

\*Update Data 31 Desember 2022

Tahun 2022 capaian realisasi pada indikator kegiatan angka persentase penyelesaian perizinan UGB maupun PUB telah mencapai angka persentase yang telah ditetapkan. Dari 1072 penyelenggara UGB dan PUB yang telah diterbitkan SK izin penyelenggaraanya, semuanya telah melaksanakan proses penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai dengan SK izin dan ketentuan yang berlaku. Untuk pencapaian kinerja Direktorat PSDS sudah menunjukkan hasil yang maksimal karena target mencapai angka 100%.

SK Perizinan UGB tahun 2022 mengalami penurunan kuantitas dari tahun sebelumnya karena adanya regulasi baru yaitu Permensos No. 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah sehingga berdampak pada penurunan permohonan izin penyelenggaraan UGB karena terdapat banyak penyelenggara UGB yang selama ini belum berbadan hukum dan belum mempunyai izin sebagai Perseroan Terbatas (PT). Selain itu penundaan penerbitan SK permohonan penyelenggaraa UGB disebabkan karena banyak penyelenggara UGB yang belum menyerahkan laporan penyelenggaraan UGB periode sebelumnya. Hal ini secara otomatis menyebabkan menurunnya jumlah penyelenggara yang mengajukan izin penyelenggaraan UGB pada tahun 2022. Untuk meningkatkan target permohonan izin baik penyelenggaraan UGB maupun PUB maka perlu dilakukan sosialisasi secara rutin yang dilakukan oleh pihak instansi yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan PUB mengakibatkan menjamurnya PUB yang tidak berizin.

# SURVEY KEPUASAN PENGUNJUNG TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL UTAMA KALIBATA

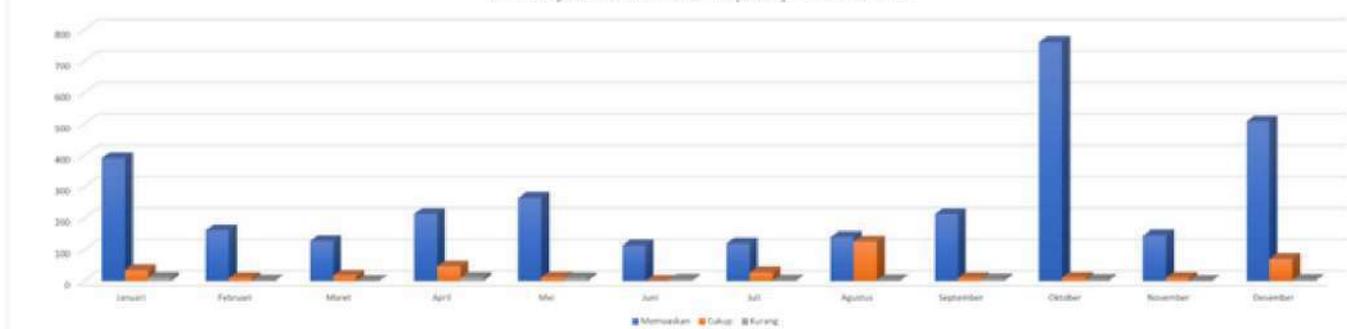
## TAHUN 2022

ii.

### NILAI KEPUASAN PEZIARAH TERHADAP PELAYANAN DAN FASILITAS

	BULAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Memuaskan	391	161	127	214	265	113	119	140	213	761	145	508
Cukup	34	9	17	46	11	0	27	125	9	10	10	70
Kurang	10	1	0	10	9	4	1	2	5	3	0	3

Grafik Kepuasan Peziarah Terhadap Pelayanan dan Fasilitas



### REKAPITULASI DATA PENGUNJUNG TMPNU DAN MPN TAHUN 2022

NOMOR	BULAN	MEMUASKAN	CUKUP	KURANG
1	JANUARI	391	34	10
2	FEBRUARI	161	9	1
3	MARET	127	17	0
4	APRIL	214	46	10
5	MEI	265	11	9
6	JUNI	113	0	4
7	JULI	119	27	1
8	AGUSTUS	140	125	2
9	SEPTEMBER	213	9	5
10	OKTOBER	761	10	3
11	NOVEMBER	145	10	0
12	DESEMBER	508	70	3
<b>TOTAL</b>		<b>3157</b>	<b>368</b>	<b>48</b>
	<b>TOTAL PENGUNJUNG</b>		<b>3573</b>	

Sesuai data yang diperoleh dari hasil survey dapat dirinci sebagai berikut:

Memuaskan : 3.157 orang

Cukup : 368 orang

Kurang : 48 orang

Total Pengunjung yang mengisi survey sebanyak 3.573 orang

Tahun 2022 adalah tahun pertama dilakukannya survey kepuasan terhadap pengunjung Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata. Meskipun demikian capaian target yang telah ditentukan menunjukkan angka yang memuaskan. Hal tersebut dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan pelayanan pada Makam Pahlawan Nasional lainnya yang berada di seluruh Indonesia.

# NILAI KINERJA ANGGARAN

**Capaian**  
**107,138%**

**Target 80**  
**Realisasi 85,71**

Realisasi

$$\begin{aligned}
 \text{REALISASI} &= (60\% \times \text{NILAI SMART}) + (40\% \times \text{NILAI IKPA}) \\
 &= (60\% \times 97,78) + (40\% \times 85,22) \\
 &= 58,67 + 34,09 \\
 &= 92,76
 \end{aligned}$$

## NILAI SMART

**97,78**

- PENYERAPAN 99,94
- KONSISTENSI 66,91
- CRO 100
- EFISIENSI 8,44
- NILAI EFISIENSI 71,1

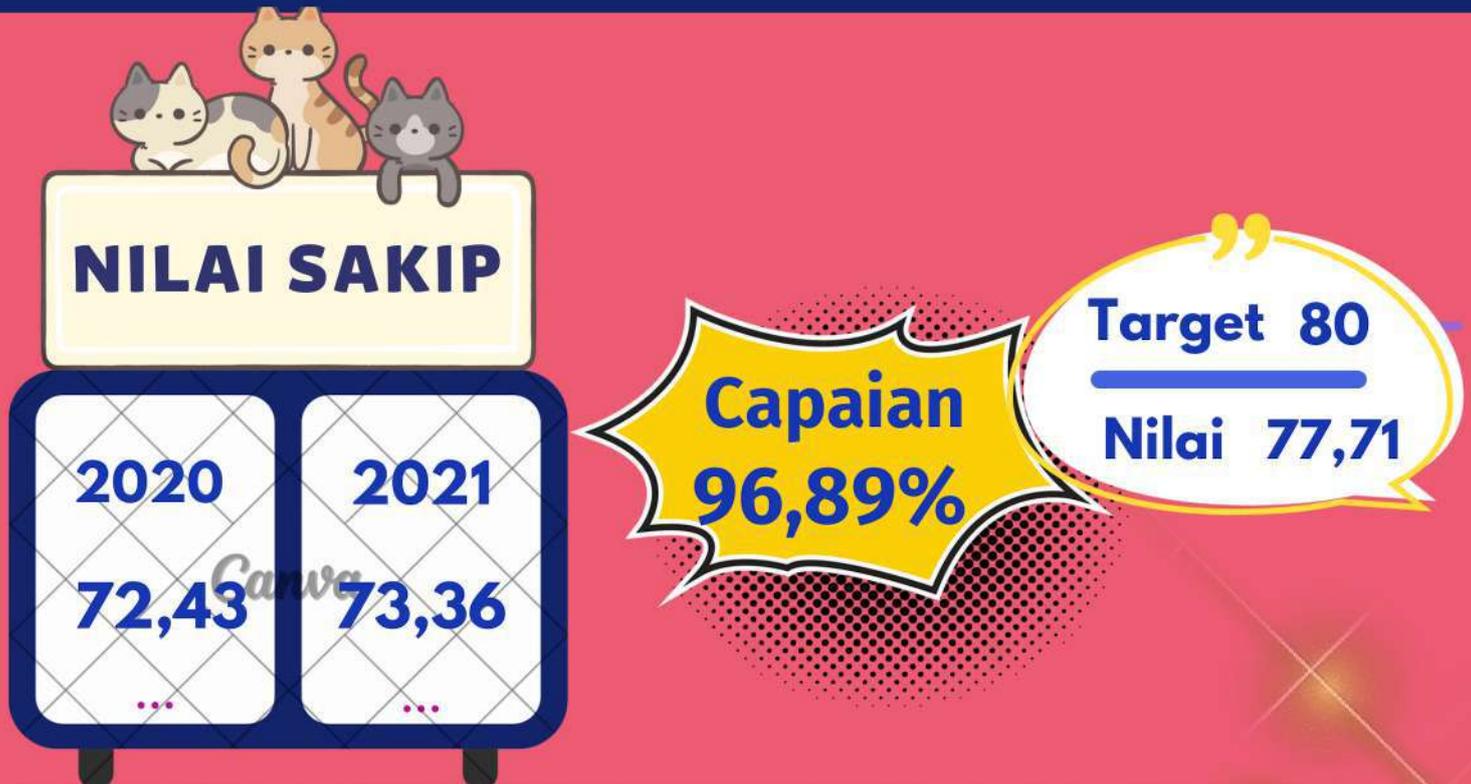


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

### REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Kode Kegiatan : 6273 | PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN | Bulan : 01 | s.d. 12

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	6273   Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	PAGU REALISASI	0 0,00%	20.024.044.000 19.586.085.759 (97,81%)	7.022.090.000 6.995.298.500 (99,62%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	131.021.069.000 131.021.067.341 (100,00%)	0 0,00%	0 0,00%	158.067.203.000 157.602.451.600 (99,71%)
		SISA	0	437.958.241	26.791.500	0	0	0	1.659	0	0	464.751.400
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0,00%)	20.024.044.000 19.586.085.759 (97,81%)	7.022.090.000 6.995.298.500 (99,62%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	131.021.069.000 131.021.067.341 (100,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	158.067.203.000 157.602.451.600 (99,71%)
		SISA	0	437.958.241	26.791.500	0	0	0	1.659	0	0	464.751.400



### Analisis Capaian

Target nilai SAKIP Direktorat PSDS Tahun 2022 sebesar 80 tidak tercapai. Nilai yang diperoleh Direktorat PSDS hanya mencapai skor 77,71. Meskipun demikian capaian yang skor yang diperoleh Direktora PSDS sudah mencapai kategori cukup baik yaitu sebesar 96,89%. Adapun kendala yang dihadapi adalah antara lain :

- Perencanaan kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan pelaksanaan monitoring terhadap Rencana Aksi yang belum dilakukan secara maksimal.
- Pengukuran kinerja yang belum optimal
- Pelaporan kinerja belum menyajikan informasi yang berorientasi outcomedan belum digunakan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja
- Hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan kinerja
- Pencapaian sasaran kinerja organisasi belum sepenuhnya berorientasi outcome.

### Hasil Evaluasi

Skor Evaluasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Tahun 2022 memperoleh skor evaluasi sebesar 77,71 dengan kategori BB dan interpretasi akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang handal. Rincian penilaian bobot penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	BOBOT NILAI
PERENCANAAN KINERJA	30	
PENGUKURAN KINERJA	25	
PELAPORAN KINERJA	15	
EVALUASI INTERNAL	10	
PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20	

**NILAI INDEKS SURVEY  
KEPUASAN MASYARAKAT****2020****85,49****2021****87,09****Target 85**  
**Nilai 87,15****Capaian**  
**102,53%**

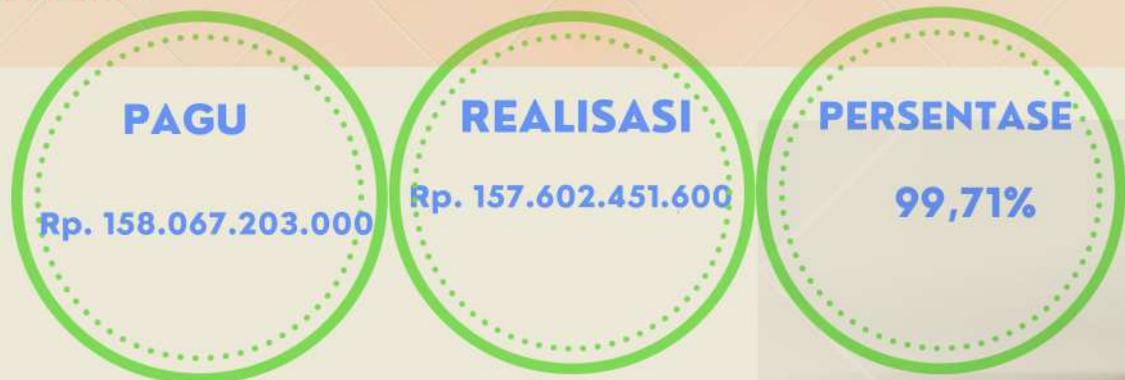
*Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial kepada penyelenggara UGB atau PUB dan kepada Agency yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan UGB atau PUB.*

*Tahun 2022 Direktorat PSDS mendapatkan peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat meskipun tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, akan tetapi setidaknya hal ini menjadi bahan evaluasi agar Direktorat PSDS melakukan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada para stakeholder dari para penyelenggara UGB maupun dari Agency UGB.*

*Selain itu hasil dari pelaksanaan survey tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan Direktorat PSDS untuk meningkatkan pelayanan publik secara prima, serta menjadi bagian penting rencana strategis di masa depan terkait peningkatan pelayanan publik.*

## Realisasi Anggaran

**SESUAI DATA OM-SPAN ANGGARAN DIREKTORAT PSDS ADALAH:**



## Sumber Dana



Direktorat PSDS memiliki anggaran yang bersumber dari 3 terdiri Rupiah Murni, PNB, dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Adapun rincian anggaran yang terdapat pada Direktorat PSDS adalah:

1. Rupiah Murni adalah pagu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat langsung digunakan oleh Direktorat PSDS pada setiap awal tahun berjalan. Nilai pagu Rupiah Murni Direktorat PSDS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.19.470.650.000
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan nilai pagu yang ditetapkan oleh Direktorat PSDS. Tahun Anggaran 2022 Direktorat PSDS menetapkan pagu PNBP sebesar sebesar Rp. 750.000.000. Dari target yang ditetapkan Direktorat PSDS mencapai angka pendapatan sebesar Rp. 628.289.225. Dari perolehan dana tersebut maka Direktorat PSDS dapat menggunakan pagu yang bersumber dari PNBP sebesar 66.53% dari capaian target. Oleh karena itu nilai Direktorat PSDS mempergunakan anggaran sebesar Rp. 396.585.330 untuk pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB.
3. Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), Pagu hibah Direktorat PSDS diperoleh dari mbyaran sebesar 10% dari total hadiah yang diajukan oleh penyelenggara Undian Gratis Berhadiah. Pendapatan hibah yang dibelanjakan oleh Direktorat PSDS akan disahkan sebagai pagu. Untuk besaran Dana Hibah yang dihasilkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 131.021.069.000

## Anggaran Direktorat PSDS

## Pagu Per Belanja

	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos
Perizinan dan Pemantauan	Rp.4.819.982.000		
TMPN/MPN	Rp.15.204.062.000	Rp.7.022.090.000	
Pemanfaatan Hibah			Rp.131.021.069.000

### Total Pagu Per Belanja

Rp.20.024.044.000    Rp.7.022.090.000    Rp.131.021.069.000

## Realisasi Per Belanja

	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos
Perizinan dan Pemantauan	Rp.4.157.123.000		
TMPN/MPN	Rp.15.428.962.759	Rp.6.995.298.500	
Pemanfaatan Hibah			Rp.131.021.067.341

### Total Realisasi Per Belanja

Rp.19.586.085.759    Rp.6.995.298.500    Rp.131.021.067.341

**Total Pagu**

**Rp.158.067.203.000**

**Persentase Realisasi**

**Total Realisasi**

**Rp.157.602.451.600**

**99,71%**

## Kontribusi PNBP

“  
 SESUAI DENGAN KMK  
 NO.380/KMK.02/2013 TENTANG  
 PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN  
 DANA PNBP PADA KEMENTERIAN SOSIAL,  
 DIREKTORAT PSDBS DAPAT  
 MENGGUNAKAN PENDAPATAN PNBP  
 SEBESAR 66,53%  
 ”

### PENERIMAAN ANGGARAN PNBP

**Rp. 628.289.225**

### Penggunaan PNBP Tahun 2022

- **Maksimum Penggunaan Dana PNBP pada Direktorat adalah senilai Rp. 396.585.330 .**
- **Pembayaran Belanja Barang dipergunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB.**

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Biaya Izin Promosi/iklan dan Biaya Permohonan Izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah merupakan salah satu potensi sumber PNBP yang bisa dipergunakan untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.**



## Realisasi HIBAH

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH PASAL 16 AYAT (2) @PENYELENGGARA UGB YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN LEGALITAS INSTITUSI DAN RENCANA PROGRAM WAJIB MELAKUKAN PEMBAYARAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG PALING SEDIKIT SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH TOTAL NILAI HADIAH.

<b>Rp. 329.450.245.873</b>	<b>Rp.131.021.067.341</b>	<b>Rp.131.021.067.341</b>
SALDO AWAL	REGISTER	PENGESAHAN

### Penggunaan Dana Hibah per UKE I

- **Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial**  
**Rp. 111. 675. 028.566**
- **Direktorat Rehabilitasi Sosial**  
**Rp. 7.697.165.272**
- **Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminian Sosial**  
**Rp. 10.732.922.500**
- **Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin**  
**Rp. 50.000.000**

**Total penggunaan dana hibah yang telah tersalurkan pada tahun 2022 adalah**  
**Rp. 131.021.067.341**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan



Laporan Kinerja Direktorat PSDS tahun 202 disusun sebagai bahan evaluasi untuk kinerja Direktorat PSDS selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini mencakup pelaksanaan kegiatan untuk program yang telah di rencanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Direktorat PSDS. Indikator Kinerja Direktorat PSDS dituangkan dalam bentuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber dana hibah dlama penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hasil evaluasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai penilai kinerja kuantitatif yang transparan serta dan dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSDS berjalan sesuai dengan program yang sudah ditargetka.

Meskipun Pencapaian penilaian kinerja Direktorat PSDS belum maksimal, akan tetapi secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa Direktorat PSDS sudah melaksanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tepat dan transparan. Adapaun beberapa kendala yang dialami Direktorat PSDS selama tahun anggaran 2022 adalah karena adanya kebijakan untuk tidak mengeluarkan permohonan izin penyelenggraaan UGB sebelum menyerahkan laporan untuk periode program sebelumnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya potenis penerimaan baik untuk anggaran PNBp maupun untuk dana Hibah. ,

Penetapan indikator kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan menuju terwujudnya visi dan misi Direktorat Potensi Sumber Daya Sosial. Dalam proses penetapannya, dilakukan penyempurnaan indikator kinerja selaras dengan indikator Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial RI. Dari target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PSDS yang tercantum didalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara keseluruhan pencapain realisasin anggaran Direktorat PSDS sudah mencapai target yang sangat baik.

## B. Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan kembali capaian di tahun berikutnya maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pemantaun dan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan UGB untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan baik untuk dana PNPB maupun dana hibah;
- Penguatan Kapasitas Pegawai Direktorat PSDS;
- Menyesuaikan SDM pada Direktorat PSDS sesuai dengan peta jabatan dan beban kerja.
- Memperkuat sinergi antar Satuan Kerja di Kementerian Sosial, antar Kementerian/Lembaga, dan dengan Dinas Sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Aplikasi [simppsdbs.kemsos.go.id](http://simppsdbs.kemsos.go.id) serta penguatan database Direktorat PSDS
- Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang tugas dan fungsi
- Memperbaiki implementasi SAKIP lingkup Direktorat PSDS antara lain dalam hal pelaporan kinerja secara online dan evaluasi internal.